

REGULASI PRODUKTIF PETANI JAGUNG MEMBANGUN KEDAULATAN PERTANIAN ORGANIK ATAS BENIH DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN TERNAK

Puspita Chairun Nisa
Universitas Mpu Tantular, Jakarta
Jalan Cipinang Besar Nomor 2, Jakarta
puspita.ch@gmail.com

Abstrak

Petani jagung kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan melakukan persekongkolan antara pemerintah pusat dengan perusahaan. Tujuannya untuk impor jagung dari luar serta mengizinkan perusahaan asing untuk mengelola regulasi pertanian Indonesia sehingga petani mengalami kesulitan. Pemerintah, belum menunjukkan keberpihakannya pada kedaulatan benih di kalangan petani dan praktik eksploitasi terhadap petani terus berjalan. Nasib para petani diberbagai daerah adalah cermin betapa petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri. Solidaritas lahir melalui kepercayaan yang dibangun berabad-abad oleh sesama petani. Saling mempercayai antar petani tercermin dalam transaksi benih jagung lokal. Pada dasarnya setiap petani, komunitas, dan negara berhak untuk memutuskan sendiri kebijakan pengelolaan pertanian dan pangannya yang layak secara ekologi, sosial, ekonomi, budaya, serta khas lokal. Sebab itu berbagai bentuk marginalisasi petani dan komunitas perdesaan, serta degradasi lingkungan pertanian yang mengancam keberlanjutan kehidupan perlu dihindari. Maka salah satu solusinya, pertanian organik harus dikembalikan pada teknik bertani tanpa pupuk kimia dan pestisida. Hal ini dapat dilakukan ketika ada upaya pemberdayaan ternak secara maksimal di tingkat petani sehingga kedepan dapat diolah sendiri menjadi pupuk organik.

Kata kunci: Regulasi Produktif, Petani Jagung, Kedaulatan Pertanian Organik, Benih, dan Pemberdayaan

Abstract

Corn farmers receive less attention from the government, even a conspiracy between the central government and the company. The goal is to import corn from the outside and allowing foreign companies to manage the regulation of Indonesian agriculture so that farmers are experiencing difficulties. Government, yet supportive of the sovereignty of seeds among farmers and the exploitation of peasants continue to run. The fate of farmers in various regions is a mirror of how farmers are not sovereign over their own seeds. Solidarity was born through a trust that was built centuries by fellow farmers. Mutual trust among farmers is reflected in local maize seed transactions. Basically every farmer, communities, and countries have the right to decide their own agriculture and its food management policies viable ecological, social, economic, cultural, as well as local specialties. Therefore, various forms of marginalization of farmers and rural communities, as well as agricultural environmental degradation that threatens the sustainability of life should be avoided. Then the sala of the solution, organic farming techniques should be returned to the farm without chemical fertilizers and pesticides. This can be done when there is an effort to empower maksimal livestock at the farm level so that the future can recycle themselves into organic fertilizer.

Keywords: Regulation Productive, Corn Growers, Sovereignty Organic Farming, Seeds and Empowerment

Pendahuluan

Mengeluhnya keluarga Burhanuddin terkait harga jagung yang mereka panen anjlok hingga ke dasar harga 2000 rupiah. Tentu ini menjadi bukti bahwa petani jagung Indonesia harus menghadapi penjajahan dalam pertanian. Melihat kenyataan itu, Indonesia merupakan negara agraris yang mulai kehilangan jati dirinya. Untuk mengembalikan kejayaan ini tentu akan sangat sulit. Negeri yang pernah disebut sebagai zamrud katulistiwa, penuh dengan kekayaan eksotik (Fakta News, 2016). Negara agraris dan negara maritime melekat pada dinding hati petani

bangsa ini sebagai julukan dan lambung kesejahteraan yang memiliki tanah pertanian nan subur dan lautan luas, kaya raya dengan hasil perikanan dan pertanian yang melimpah ruah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mata pencaharian utama masyarakat Indonesia pada umumnya adalah petani dan nelayan. Berbagai hasil pertanian diunggulkan sebagai tulang punggung perekonomian rakyat dan Negara. Jati diri itu hampir hilang, nyatanya yang terjadi sekarang posisi petani semakin tercekik dengan merosotnya harga harga hasil pertanian. Kebutuhan pertanian mulai dari

pupuk, bibit unggul, pestisida, dan bahan pertanian lainnya kini harganya menjadi sangat tinggi. Akibatnya, produksi makanan pokok menjadi berkurang.

Apa yang terjadi selanjutnya?, pemerintah mengimpor bahan-bahan pokok tersebut dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini yang membuat kehidupan petani menjadi semakin terdesak. Mengerikan, ketika harga beras menjadi mahal, dan masyarakat miskin dihimbau agar diet dan mengurangi konsumsi nasi, karena beras mahal, kata seorang menteri. Hal yang sangat bertolak belakang, apakah yang terjadi dengan bangsa ini, sehingga Negara agraris kehilangan jati diri. Bagaimana petani bisa berdikari seperti layaknya dahulu. Tentu harus ada gerakan.

Realitasnya saat ini, berubahnya sistem pertanian Indonesia dari multikultur ke monokultur dan memperbesar biaya produksi. Kecuali tenaga mereka sendiri, bibit, pupuk, dan pestisida harus dibeli petani dari toko pertanian yang merupakan agen penjual dari perusahaan transnasional sehingga terasa diperas dan pemerintah jarang sekali memperhatikan fakta lapangan ini. (Ashadi,2014)

Regulasi Benih di Ladang Jagung

Penawaran modal oleh Bank pemerintah seperti BRI dalam bentuk kredit KUR yang dimulai sejak pemerintahan SBY hingga sekarang ini memberikan kemudahan bagi petani dalam peminjaman modal untuk usaha dibidang pertanian. Namun, ada hal tidak sedap bagi petani bahwa kehadiran perusahaan produsen benih diberbagai tempat di daerah seluruh Indonesia, justru menambah masalah dan beban berat bagi petani. Melalui kontrak kerjasama antara perusahaan dengan petani dinilai lebih menguntungkan perusahaan.

Setelah ditelusuri perusahaan tersebut berasal dari China yang mangkal di Indonesia khusus menggarap pertanian dan diberikan karpet merah bagi pemerintah pusat. Perusahaan-perusahaan China tersebut menjual benih dipasaran seharga Rp 30.000 - 45.000/Kg dan bersedia membeli hasil panen yang diambil langsung ke sawah seharga Rp 2000 per kilogram. Apabila dalam proses penangkaran, pembuatan dan pengadaan benih oleh perusahaan, maka petani akan

dikenai potongan harga sebesar Rp 500 per kilogram sehingga menjadi Rp 1.500 per kilogram.

Melalui kerjasama antara petani dengan perusahaan hanya menyediakan benih, mengemas atau memberi label hasil produksi petani, untuk kemudian menjualnya lagi ke petani dengan keuntungan berlipat. Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan China tersebut adalah memipil jagung, mengeringkan dengan oven, memberikan fungisida, mengemas, dan menjual pada petani dengan harga 25—43 kali lipat. Jagung dibeli dari petani seharga Rp 1.200 dan dijual kembali ke petani dengan harga minimal Rp 30.000. Artinya, biaya pengemasan dan pemberian label adalah Rp 28.800, yang sekaligus menjadi keuntungan perusahaan benih. Tentu cara ini harus di pikirkan oleh pemerintah dan model perusahaan seperti itu sudah terbukti menghisap keringat dan darah petani Indonesia. maka, tentu harus disikapi secara proporsional melalui berbagai terapan kebijakan secara khusus.

Sementara, kita mengambil kasus saja di daerah Kabupaten Sumbawa dengan tingkat pendapatan masyarakat petani dibawah kelayakan. Petani secara berani mengambil resiko dengan meminjam uang Bank atas nama program KUR di Bank Republik Indonesia (BRI) sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dengan resiko bunga berkisar antara 12.000.000.00 (dua belas juta) – 15.000.000.00 (lima belas juta) rupiah. Pengembalian uang itupun ke BRI dalam tempo waktu 3-4 bulan lamanya. Apabila petani tidak memenuhi standar waktu yang ditentukan oleh BRI, maka jaminan yang diberikan ke BRI berupa sertifikat tanah akan di ambil alih tanpa ada keringannya apapun yang ditempuh oleh Bank itu sendiri.

Dari biaya sebesar 10.000.000.00 (sepuluh juta) diatas yang harus dikeluarkan petani Indonesia untuk menanam jagung di lahan seluas 1—4 hektartanah ladang, adalah Rp 6.000.000, ini meliputi biaya tanam, perawatan, pemupukan dan panen. Jika harga jual jagung Rp 2.000 per kilogram, berarti petani memperoleh Rp 2.000.000 jika bisa mendapat satu ton panen. Apabila hasil panen mencapai 5-10 ton, maka tentu petani akan memetika hasil dengan selisih sedikit sebagai keuntungan dari hasil tanam jagung.

Apabila hasil panen jagung di peroleh dibawah 5 Ton, maka tentu petani akan mengalami kerugian besar, bukan saja menanggung beban berat tanpa resiko, namun dikejar oleh bunga bank yang selama ini mereka adakan perjanjian. Misalkan saja hasil panen jagung berkisar satu ton sehingga mereka mendapat harga per/ton itu hanya Rp 2.000.000 rupaih dikurangi biaya produksi Rp 6.000.000.00(lima juta) rupiah di tambah biaya pemeliharaan jagung dimulai sejak tanam hingga panen berkisar adalah Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah. Maka, kalau dikalkulasikan dan total income yang harus di peroleh adalah 0,0 % yang artinya petani jagung mengalami kerugian besar dan harus terbebani dengan hutang yang menumpuk. Bisa dibilang, petani tidak mendapat keuntungan sama sekali. Ini diperparah dengan adanya persekongkolan antara pemerintah pusat yang mengimpor jagung dari luar serta mengijinkan perusahaan asing untuk mengelola regulasi pertanian Indonesia sehingga petani mengalami penindasan yang sangat serius. Dan pemerintah sendiri menghisap darah daging rakyatnya sendiri melalui berbagai regulasi pertanian yang mencekik rakyat dan petani jagung.

Petani Tertipu; Berdalih Sertifikasi Benih

Persekongkolan bisa dilihat dari fakta bahwa kasus diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Semisal dari kasus Burhanuddin yang ternyata bukan satu-satunya. Kasus serupa terjadi di kabupaten lain yaitu Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Para petani di tiga kabupaten itu juga dituduh melakukan sertifikasi illegal dan pelapornya adalah perusahaan China dengan dalih "sertifikasi". Padahal selama ini benih jagung berlabel "bibit unggul" yang dijual dipasaran tidak pernah mencantumkan cara tanam, ciri tanaman, dan info terkait sertifikasi. Ini berarti, petani sengaja "dibodohkan" karena mereka dibuat tidak tahu tanaman yang ditanamnya dan tidak bisa melakukan penangkaran benih sehingga terus membeli benih dari perusahaan. Akibatnya petani mengalami ketergantungan dan merugi setiap panen. (Ashadi, 2014)

Pemerintah pun belum menunjukkan keberpihakannya pada kedaulatan benih di kalangan petani. Contohnya, bulan Juli 2006 lalu ketika meninjau berbagai perusahaan China, Menteri Pertanian Anton Apriyantono

menyatakan Departemen Pertanian berencana memberikan subsidi benih bagi petani senilai Rp 1,7 triliun. Benih yang akan disubsidi adalah padi, jagung sebesar 25—50 persen dan kedelai 75 persen. Menurutnya, subsidi ini tidak akan menguntungkan perusahaan benih namun menguntungkan petani (Kompas,2006).Betulkah subsidi mengangkat nasib petani dan tidak menguntungkan produsen benih?

Pemerintah seharusnya menjadi pelayan rakyat dan membuat kebijakan yang bisa menjamin masa depan pangan bangsa. Salah satunya melindungi pasokan benih petani (Ashadi,2014). Lantas kenapa subsidi benih yang jelas akan membuat para petani tergantung pada produsen benih justru dilakukan dengan bangga oleh Menteri Pertanian, bahkan dianggap menyelesaikan salah satu masalah pokok pertanian dan pangan Indonesia?

Ini terjadi karena negara sudah tidak berpihak lagi pada petani dan lebih mementingkan kesejahteraan pemodal/produsen benih. Berbagai kasus-kasus seperti ini di daerah dengan jelas menggambarkan bagaimana dominasi dan tekanan perusahaan transnasional maupun multinasional dalam mempengaruhi kebijakan sebuah negara.

Ini adalah bentuk penjajahan baru terhadap keberlanjutan petani dan pangan, dan negara hanya menjadi alat bagi kepentingan pemodal. Ini membuktikan kebenaran teori Adam Smith bahwa perdagangan harus bebas dari peranan negara dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar (Ashadi, 2007). Karena itu perlu sikap kritis dari masyarakat terkait persoalan ini. Para pengambil kebijakan harus introspeksi diri: benarkah keputusannya menguntungkan petani atau menguntungkan perusahaan benih dan menindas petani?. UU No.12 Tahun 1992 yang dipakai sebagai tameng selayaknya dicabut dan diganti aturan yang lebih berorientasi pada perlindungan sumber daya genetik nasional untuk ketahanan dan kedaulatan pangan. Dibutuhkan kebijakan radikal dan progresif terkait kemandirian benih, agar kita sebagai bangsa agraris tidak terus-menerus dijajah dan bisa mandiri di sektor pangan.

Menjaga Produktifitas: Membangun Kedaulatan Petani Atas Benih

Perusahaan benih telah melakukan praktik eksploitasi dan menjadikan petani sebagai "sapi perahan". Jika dicermati, ternyata mengandung banyak unsur manipulasi. Dalam menentukan harga beli hasil panen petani yang merupakan bahan baku pembuatan benih, produsen benih tidak memperhitungkan ongkos beli/sewa lahan, biaya pengairan, serta upah pekerja yang merawat tanaman dan mememanennya. Jadi produsen banyak diuntungkan karena biaya produksi bisa ditekan serendah mungkin.

Ini bisa dilakukan secara simultan oleh organisasi petani yang anggotanya masih memiliki benih-benih lokal untuk disimpan di "bank benih pangan" dan dikelola bersama oleh petani dan organisasi petani. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan petani juga tak kalah penting (Ashadi,2007).

Negaraharus melindungi kepentingan petani dan sistem budi daya. Nasib para petani diberbagai daerah adalah cermin betapa petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri. Ini sekaligus menunjukkan bahwa derasnya laju benih hasil rekayasa genetik maupun hibrida yang tidak diimbangi dengan distribusi pengetahuan yang cukup terkait masalah tersebut. Petani mungkin tidak pernah tahu tentang Undang-undang (UU) Hak Paten, UU Budi Daya Tanaman, dan seterusnya (Ashadi,2007). Mereka baru tahu ketika UU itu telah menjadi tali laso yang menjerat leher dan membawa mereka ke penjara.

Pentingnya Benih Benih bisa dibilang input terpenting dalam budi daya pertanian. Tanpa benih yang berkualitas tidak akan diperoleh hasil panen yang baik. Sayangnya, memilih benih yang baik bukanlah pekerjaan mudah mengingat sifat benih yang tidak "transparan". Maksudnya, mustahil mengetahui karakteristik dan kualitas tanaman yang akan tumbuh dari sekantong benih hanya dengan melihatnya. Kualitas benih baru bisa diketahui ketika benih tersebut ditanam dan kemudian tumbuh. Untuk mengantisipasi hal ini, petani sejak dahulu biasa memproduksi bibitnya sendiri. Dengan memakai indukan yang jelas diketahui sifat-sifatnya, petani memproduksi benih secara mandiri menggunakan teknologi dan metode tradisional yang mereka kembangkan sendiri.

Selama puluhan tahun, petani bergantung pada hasil panen mereka, memilih biji terbaik, menyimpan, dan menggunakannya sebagai benih pada musim tanam selanjutnya. Tidak hanya pada padi, petani juga menerapkannya pada kentang dan tanaman budi daya lain yang dikembangbiakkan secara vegetatif (Ashadi,2007).

Dengan memilih benih atau bibit tanaman yang memenuhi kebutuhan kondisi pertanian mereka, petani telah mengembangkan dan membiakkan varietas lokal yang sesuai keadaan dan selera mereka. Dengan tujuan menciptakan swasembada pangan, petani diperkenalkan dan dipaksa menggunakan bibit-bibit hibrida. Bibit-bibit baru ini dijanjikan tahan hama penyakit dan memberikan panen melimpah. Hasil panen di awal era Revolusi Hijau memang menunjukkan peningkatan yang besar sehingga petani akhirnya tertarik untuk terus menggunakan benih hibrida.

Di sinilah dimulai ketergantungan dan keterpurukan petani. Petani tidak lagi menghasilkan benih sendiri karena terbiasa menggunakan benih produksi perusahaan. Pun biaya produksi menjadi lebih mahal karena pemakaian benih hibrida harus diikuti pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang harus dibeli juga oleh petani. Parahnya lagi, selain mengakibatkan ketergantungan petani pada benih dari perusahaan. Ketidakterpikirkan kebijakan pemerintah di bidang pertanian dan petani. Pemerintah lebih banyak memberikan dukungan politis (dalam wujud UU dan kebijakan) kepada perusahaan benih multinasional. Pada kurun waktu tahun 2007 pemerintah memberikan subsidi dengan cara impor benih dari Cina (Ashadi,2007). Begitu juga sekarang, mengimpor benih dan jagungnya sendiri dari Thailand, Malaysia dan Brasil. Sungguh pemerintah tidak memikirkan nasib petani yang mereka menanam dan menjual jagung hasil panennya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah pada kedaulatan benih petani (Ashadi,2007).

Dengan masuknya benih dan jagung impor, petani tidak dilatih untuk mandiri. Ini juga membuat pertanian di Indonesia tidak berkelanjutan karena tergantung input dari luar. Selain itu, ada peluang merebaknya serangan hama baru, mengingat tidak ada

jaminan bahwa benih dan jagung impor ini bebas hama penyakit. Juga tidak ada jaminan seratus persen bahwa pemakaian benih akan meningkatkan hasil panen karena belum diketahui tingkat adaptasi tanaman terhadap kondisi di Indonesia.

Belajar dari fakta tersebut, kemandirian petani dalam memproduksi jagung dan benih sendiri sebagai bagian dari praktik pertanian berkelanjutan dengan standar yang bagus. Di tengah dominasi ketergantungan pada impor jagung dan benihnya dari perusahaan asing, ternyata masih banyak petani yang membuktikan bisa memproduksi benih sendiri. Petani Indonesia bisa menghadapi serakahnya perusahaan-perusahaan China yang berusaha mengendalikan petani dengan solidaritas dan kerjasama.

Solidaritas lahir melalui kepercayaan yang dibangun berabad-abad oleh sesama petani. Saling mempercayai antar petani tercermin dalam transaksi benih jagung lokal. Ternyata, jaringan sosial dan relasi personal dengan berbagai pihak dapat membuat hidup lebih mudah dan memberikan keringanan, misalnya ketika timbul keadaan darurat atas jagung dan benih yang harus diperoleh. Maka penting jejaring pertukaran benih antarpetani bisa dikembangkan menjadi bentuk yang lebih terorganisasi, yaitu bank benih.

Di bank benih petani bisa menyimpan dan meminjam benih sehingga ketersediaan benih bisa selalu terjaga. Bank benih biasanya dikelola bersama oleh petani. Pengelolaan bank benih oleh petani atas benih adalah tersedianya akses pada benih itu sendiri. Upaya memperbaiki akses petani skala kecil terhadap beragam jenis benih dengan melibatkan mitra-mitra nonformal yang berminat. Hasilnya, benih yang dipasok secara teratur kepada petani meningkat enam kali lipat dalam waktu tiga tahun. Agar benih jagung tetap lestari, biasanya sangat memperhatikan penyimpanan benih.

Hasil panen untuk benih disimpan di tempat khusus dan terpisah dengan jatah untuk konsumsi. Pemisahan ini penting untuk menyediakan benih pada musim tanam berikutnya. Pemberdayaan sistem penyediaan benih lokal guna mengembalikan kedaulatan petani atas benih, bukanlah sesuatu yang hanya di awang-awang. Bukti sangat banyak diberbagai bagian dunia menunjukkan, sistem semacam ini sangat berguna bagi petani skala

kecil yang miskin sumber daya dan kurang memiliki akses. Penggunaan ragam benih lokal akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan suatu pertanian dibanding bergantung pada pemakaian benih dari input luar dan jangan tergantung pada perusahaan asing karena menyebabkan kerugian besar pada petani itu sendiri.

Pada dasarnya setiap petani, komunitas, dan negara berhak untuk memutuskan sendiri kebijakan pengelolaan pertanian dan pangannya yang layak secara ekologi, sosial, ekonomi, budaya, serta khas lokal. Sebab itu berbagai bentuk marginalisasi petani dan komunitas perdesaan, serta degradasi lingkungan pertanian yang mengancam keberlanjutan kehidupan perlu dihindari. Realitas petani dan pertanian selama puluhan tahun telah menjadi korban dari sistem sosial nasional dan global. Introduksi massif revolusi hijau pada gilirannya telah membawa petani tergantung terhadap asupan benih, pupuk, pestisida, pengetahuan, alat, dan mesin pertanian serta pasar dari pihak luar. Intensifikasi pertanian yang mengedepankan pemakaian asupan kimia secara meluas telah mencemari air dan udara, menurunkan kesuburan tanah, serta mereduksi keaneka ragaman genetik sumber daya alam. Semua ini akan berujung pada ancaman kehidupan di bumi (Kementrian Pertanian, 2007).

Untuk itu diperlukan gerakan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan petani dan sistem pertanian yang berkelanjutan. Terciptanya keselarasan alam dan masyarakat yang berdaulat, mandiri, demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu juga, mendorong upaya-upaya masyarakat membangun Indonesia yang organis berbasis sumber daya lokal yang berkeadilan melalui pertanian.

Pertanian Organik; Melawan dengan Pemberdayaan Ternak

Pertanian yang selaras dengan alam disebut dengan "pertanian organik". Pertanian ini kembali pada teknik bertani tanpa pupuk kimia dan pestisida. Pasar produk organik semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan produk sehat tanpa tercemar bahan kimia. Bagi petani menggunakan pupuk organik memberikan kesempatan untuk tidak

bergantung kepada pupuk pabrikan, sehingga petani menjadi mandiri dan berdaulat, karena petani memiliki semua bahan untuk pembuatan pupuk organik sehingga mereka lebih bebas dari ketergantungan dari pihak lain. (Ferry,2010)

Sejak revolusi hijau lebih dari 60 tahun yang lalu, penggunaan bahan kimia pada lahan pertanian meningkat sangat tajam. Dosis pemupukan semakin tahun semakin meningkat, bila tahun 1950 dosis pemupukan padi hanya sekitar 100 kg per ha, pada tahun 2009 menjadi 500 kg per ha dan sekarang 1000 kg per ha. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan petani sangat tergantung pada pupuk anorganik tetapi juga telah merusak lahan, membunuh serangga madu dan meningkatnya kandungan bahan kimia pada produk pertanian. (Ferry,2010)

Petani Indonesia dihadapkan pada dua jalan bercabang, yakni pertama; metode bertani yang mengandalkan pupuk kimia dan pestisida. Kedua; metode bertani selaras dengan alam atau kemudian dikenal dengan pertanian organik. Produk pertanian organik sangat diminati konsumen sehingga harganya hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan produk pertanian konvensional.

Hal ini menyebabkan produsen pupuk anorganik juga membuat pupuk organik dan pestisida nabati. PT. Pupuk Kalimantan Timur telah membangun pabrik pupuk organik berkapasitas 3.600 ton per tahun dengan merek Zeorganik. Kedepan, mereka menargetkan produksi pupuk organik mencapai 10.0000 ton per tahun. PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) juga mengembangkan pupuk organik yang diberi nama Pusri Plus dengan kapasitas produksi sebesar 100.000 ton per tahun. Pupuk organik pabrikan ini masuk ke pasar dan memenuhi kebutuhan petani, kembali menguasai petani dan petani menjadi ketergantungan. (Ferry,2010)

Dari hasil beberapa penelitian dan pengalaman petani menunjukkan bahwa pemberian bahan organik selama tiga tahun berturut-turut memberikan panen yang sama dengan menggunakan pupuk anorganik. Artinya petani tidak perlu khawatir bahwa produktivitasnya akan selalu rendah dan tidak menguntungkan. Ketersediaan bahan baku pupuk organik di pedesaan cukup banyak, teknologi pembuatan pupuk organik sudah sangat banyak, mulai dari bakteri

pembusuknya sampai pada cara memperkaya unsure haranya sesuai dengan komposisi hara yang sesuai. Pengetahuan ini yang harus dimiliki petani, melalui sekolah-sekolah lapang dan penyuluhan. Pada tahap pertama kita harus yakin bahwa petani mampu meracik pupuk organik sesuai dengan kebutuhannya, kemudian baru pengetahuan lainnya.

Dengan demikian petani akan terlepas dari ketergantungan pupuk dari pihak lain dan berdaulat dalam berusahatani. Pertanaman lada terintegrasi dengan ternak merupakan salah satu budidaya lada terpadu, yang memberikan kesempatan kepada petani untuk menyediakan pupuk organik. Satu hektar tanaman lada dengan tiang panjat hidup dari tanaman glirisedia dan penutup tanah dengan tanaman arachis pentoi, cukup menyediakan pakan 6 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Ternak ini dengan berangkasan lainnya akan menghasilkan pupuk organik sebanyak lebih kurang 8 ton/tahun atau dapat memenuhi kebutuhan pupuk 1600 batang tanaman lada setiap tahunnya. Kunci dari penyediaan sendiri pupuk organik ini adalah, bagaimana petani harus mempunyai hewan peliharaan sebagai sumber bahan organik. Hal ini dapat dilakukan ketika ada upaya pemberdayaan ternak semaksimal mungkin di tingkat petani sehingga kedepan dapat di olah sendiri menjadi pupuk organik dan tidak lagi menggunakan pupuk dari perusahaan yang merusak lingkungan dan struktur tanah pertanian.

Penutup

Bisa dibayangkan, petani tidak mendapat keuntungan sama sekali. Ini diperparah dengan adanya persekongkolan antara pemerintah pusat yang mengimpor jagung dari luar serta mengizinkan perusahaan asing untuk mengelola regulasi pertanian Indonesia sehingga petani mengalami penindasan yang sangat serius. Dan pemerintah sendiri menghisap darah daging rakyatnya sendiri melalui berbagai regulasi pertanian yang mencekik rakyat dan petani jagung.

Persekongkolan bisa dilihat dari fakta bahwa kasus diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah pun belum menunjukkan keberpihakannya pada kedaulatan benih di kalangan petani. Begitu juga, perusahaan benih telah melakukan praktik eksploitasi dan menjadikan petani

sebagai "sapi perahan". Jika dicermati, ternyata mengandung banyak unsur manipulasi. Dalam menentukan harga beli hasil panen petani yang merupakan bahan baku pembuatan benih, produsen benih tidak memperhitungkan ongkos beli/sewa lahan, biaya pengairan, serta upah pekerja yang merawat tanaman dan mememanennya.

Negara harus melindungi kepentingan petani dan sistem budi daya. Nasib para petani diberbagai daerah adalah cermin betapa petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri. Solidaritas lahir melalui kepercayaan yang dibangun berabad-abad oleh sesama petani. Saling mempercayai antar petani tercermin dalam transaksi benih jagung lokal. Ternyata, jaringan sosial dan relasi personal dengan berbagai pihak dapat membuat hidup lebih mudah dan memberikan keringanan, misalnya ketika timbul keadaan darurat atas jagung dan benih yang harus diperoleh. Maka penting jejaring pertukaran benih antar petani bisa dikembangkan menjadi bentuk yang lebih terorganisasi, yaitu bank benih.

Pada dasarnya setiap petani, komunitas, dan negara berhak untuk memutuskan sendiri kebijakan pengelolaan pertanian dan pangannya yang layak secara ekologi, sosial, ekonomi, budaya, serta khas lokal. Sebab itu berbagai bentuk marginalisasi petani dan komunitas perdesaan, serta degradasi lingkungan pertanian yang mengancam keberlanjutan kehidupan perlu dihindari.

Pertanian organik harus dikembalikan pada teknik bertani tanpa pupuk kimia dan pestisida. Pasar produk organik semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan produk sehat tanpa tercemar bahan kimia. Bagi petani menggunakan pupuk organik memberikan kesempatan untuk tidak bergantung kepada pupuk pabrikan, sehingga petani menjadi mandiri dan berdaulat, karena petani memiliki semua bahan untuk pembuat pupuk organik sehingga mereka lebih bebas dari ketergantungan dari pihak lain. Artinya petani tidak perlu khawatir bahwa produktivitasnya akan ketersediaan bahan baku pupuk organik di pedesaan cukup banyak, teknologi pembuatan pupuk organik sudah sangat banyak. Pengetahuan ini harus dimiliki petani, melalui sekolah-sekolah lapang dan penyuluhan. Hal ini dapat dilakukan ketika

ada upaya pemberdayaan ternak semaksimal mungkin di tingkat petani sehingga kedepan dapat di olah sendiri menjadi pupuk organik dan tidak lagi menggunakan pupuk dari perusahaan yang merusak lingkungan dan struktur tanah pertanian.

Daftar Pustaka

Ashadi, Ridho Saiful. (2007). *Membangun Kedaulatan Petani Atas Benih*. Jakarta: Agriculture Network.

Ferry, Yulius. (2010). *Pertanian Organik, Salah Satu cara Mengembalikan Kedaulatan Petani*. Jakarta: Litbang Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mengembalikan Kedaulatan Petani. (2007). *Buku Panduan Jaringan Kerja Pertanian Organik*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Ridho Saiful Ashadi. (2014). *Imperialisme Benih di Ladang Jagung*. Jakarta: Agriculture Network.

(15 Januari 2007). *Impor Benih Jagung*. Kompas.

(1 Februari 2016). *Indonesia Negara Agraris; Mulai Kehilangan Jati Dirinya, Kembalikan Kejayaan Petani Indonesia*. Fakta News.

(15 Juli 2006). *Sertifikasi Benih*. Kompas

(2015). *Regulasi [Artikel Weblog]*. Diakses dari www.wikipedia.com.